

PROCEEDING

26 Maret 2022

SEMINAR NASIONAL

"Kedaulatan dan Keamanan Pangan Berbasis Bisnis"



Dipublikasikan Online Pada:
Pattimura Proceeding:
Conference of Science and
Technology

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DPD HIMPUNAN ALUMNI IPB MALUKU

“Kedaulatan dan Keamanan Pangan Berbasis Bisnis”

Ambon, 26 Maret 2022

Diterbitkan oleh Universitas Pattimura
@Hak Cipta dilindungi Undang-undang

e-ISSN: 2829-3770

DOI issue: <https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2022.HAIPBMAL>

Dipublikasikan online pada:

Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology

Terindeks oleh:



November 2022

Tim Prosiding

Editor:

Dr. Ir. Welem Waileruny, M.Si (Ketua)
Dr. Pieter Agusthinus Riupassa, S.Si M.Si (Wakil Ketua)
Dr. Risyart Alberth Far-Far, S.P M.Si (Anggota)
Marlin Chrisye Wattimena, S.Pi M.Si (Anggota)
Yopi Andry Lesnussa, S.Si M.Si (Anggota)

Design Cover:

Taufan Talib, S.Pd M.Si
Ukuran: 29,7 x 21 cm

Reviewer:

1. Dr. Ir. George S. J. Tomatala, M.Si
2. Dr. Ir. Delly D. P. Matratty, M.Si
3. Dr. Ir. Welem Waileruny, M.Si
4. Dr. Ir. Betsy J. Pattiasina, M.Si
5. Dr. Ir. Christoffol Leiwakabessy, M.Si
6. Dr. Vita N. Lawalata, S.P M.Si
7. Dr. Debby V. Pattimahu, S.Hut M.Si
8. Dr. Marthina Tjoa, S. Hut, MP

Keterangan Gambar Latar Cover:

Foto “Jembatan Merah Putih” – sebuah ikon infrastruktur Kota Ambon sebagai beranda masuk-keluar Provinsi Maluku, tampak foto dari udara diambil dari arah Timur jembatan. Pembangunan jembatan ini digagas sejak 1995 oleh Karel Alberth Ralahalu, mulai dibangun 17 Juli 2011, dan diresmikan oleh Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo pada tanggal 4 April 2016, dengan APBN senilai Rp.779,2 miliar. Adalah jembatan yang melintas arah Selatan-Utara menghubungkan Desa Galala di Kecamatan Sirimau ke Desa Poka di Kecamatan Teluk Ambon, sepanjang 1.140 m dan lebar 22,5 m. Kapal dengan tinggi kurang dari 34 m dapat melintas di bawahnya. Jembatan ini telah menyingkat waktu tempuh dari Pusat Kota Ambon ke Bandara Internasional Pattimura di Laha, hanya kurang dari 30 menit. Termasuk, memudahkan akses ke Kampus Poka Universitas Pattimura di Jl. dr Johannes Leimena, dan akses ke RSUP dr Johannes Leimena di Jl. Mr. Chr. Soplanit, serta terutama akses ke Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat di Kabupaten Maluku Tengah.

Kata Pengantar

Prosiding ini disusun berdasarkan hasil SEMINAR NASIONAL yang bertemakan **Kedaulatan dan Keamanan Pangan Berbasis Bisnis** yang dilaksanakan Tanggal 26 Maret 2022, di Hotel Manise, Ambon. Penyelenggaraan seminar dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang konstruktif bagi pemerintah dan pelaku kepentingan lain sebagai upaya pencapaian tujuan Pembangunan Nasional sesuai Tema. Pemikiran-pemikiran ilmiah dalam seminar ini dijarah dari para peneliti, penyuluh serta pengalaman pelaku utama dan pelaku usaha.

Tujuan seminar ini perlu dibingkai dengan modal kemitraan di antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pikiran dan pengalaman dari pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan menuju Keamanan dan Kedaulatan Pangan di Indonesia terlebih khusus di Maluku berbasis bisnis.

Kegiatan Seminar Nasional diikuti peserta yang terdiri atas pakar, peneliti, penyuluh, perguruan tinggi, Pemerintah Daerah dan praktisi di bidang Pertanian maupun Perikanan.

Ucapan terima kasih kami disampaikan kepada Gubernur Maluku yang telah memberikan arahan dan pandangan terkait dengan pentingnya kedaulatan dan keamanan pangan khususnya di Provinsi Maluku. Penghargaan dan terima kasih juga kepada para narasumber istimewa kepada Prof. Dr. Ir. Arif Satria selaku Rektor IPB yang memberi pembobotan tentang pengembangan agromaritim di Provinsi Maluku di era otonomisasi dan juga kepada Dr. Ir. Audy Joinaldy, SPt, MSc, MM, IPM, ASEAN Eng atas paparannya tentang membangun bisnis di wilayah kepulauan. Juga kepada Prof. Dr. Ir. Debby Selano, M.Sc atas paparannya terkait dengan pengembangan perikanan di Provinsi Maluku dalam menunjang keamanan dan kedaulatan pangan.

Selanjutnya kepada para penulis dan editor serta pelaksana seminar nasional ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas hasil penelitian dan pemikiran, sejak seminar hingga tersusunnya prosiding, semuanya berlangsung dengan baik.

Akhir kata, semoga prosiding ini bermanfaat khususnya dalam mensukseskan Program Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku. Bilamana dijumpai ada kekurangan dalam naskah ini, sudilah kami dapat dimaklumi, untuk menjadi catatan perbaikan mendatang.

Ambon, Nopember 2022

DPD Himpunan Alumni IPB Maluku

Dr. Ir. G.S.J. Tomatala, M.Si (Ketua)

Kepanitiaan Seminar Nasional DPD HA IPB Maluku

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 04/SK/DPD.Mal/HA IPB/I/2022
Tentang
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA RAKER DAN SEMINAR
NASIONAL/WEBINAR TAHUN 2022

Pengurus DPD HA IPB Maluku

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyusun program kerja DPD HA IPB Maluku Tahun 2022 perlu dilakukan melalui RAKER.
2. Bahwa DPD HA IPB Maluku berkewajiban membangun jejaring bersama pemerintah dan stakeholder lain dalam menjawab berbagai permasalahan di masyarakat sekaligus memberikan kontribusi pemecahannya melalui pandangan Ilmu Pengetahuan yang pelaksanaannya melalui Seminar Nasional atau Webinar seiring dengan pelaksanaan RAKER Tahun 2022.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 perlu mengangkat Panitia pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan.
4. Bahwa Panitia dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan pengurus Harian DPD HA IPB Maluku.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Himpunan Alumni IPB
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Alumni IPB
3. Surat Keputusan DPP HA IPB No 77/SK/DPP HA IPB/X/2021 tentang pengangkatan Pengurus Daerah HA IPB Maluku Periode 2021-2025.
- Memperhatikan Hasil rapat-rapat pengurus terbatas dan pengurus lengkap DPD HA IPB Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keputusan Ketua DPD HA IPB Maluku Nomor: 04/SK/DPD.Mal/HA IPB/I/22 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana RAKER DPD HA IPB Maluku dan Seminar Nasional/Webinar Tahun 2022

Struktur Panitia sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari Surat Keputusan ini.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon pada Tanggal 31 Januari 2022
Dewan Pengurus Daerah
HA IPB Maluku

Dr. Ir. G. S. J Tomatala, M.Si

K e t u a

Dr. Ir. W. Waileruny, M.Si

S e k r e t a r i s

Tentang
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA RAKER DAN SEMINAR
NASIONAL/WEBINAR TAHUN 2022

Dewan Pengarah : 1. Dr. Ir. G.S.J Tomatala, M.Si (Ketua DPD HA. IPB Maluku)
2. Dr. Ir. W. Waileruny (Sekretaris DPD HA. IPB Maluku)

Ketua Dr. Debby V. Pattimahu, S.Hut, MSi
Wakil Ketua Dr. Ir. Christoffol Leiwakabessy, MSi
Sekretaris Dr. Marlyn C. Wattimena, SPi, M.Si
Wakil Sekretaris Dr. Ir. Rosniyati Suwarda, MSi
Bendahara Dr. Marthina Tjoa, S.Hut, MP

SEKSI-SEKSI

Seksi Acara 1. Dr. Ir. Delly D. P. Matruty, MSi Ketua
2. Dr. Adrien Jems A. Unitly, S.Si. M.Si Anggota
3. Dr. Ir. Inta Damanik, MSi
4. Dr. Ir. Yolanda M. T. N. Apituley, MAppSc
5. Stani R. Siahainenia, SPi, MSi
6. Yamres Pakniany, S.Th, MSi
7. Selfi Sangadji, SPi, MSi

Seksi Sekretariat & Komunikasi (IT), Dokumentasi 1. Dr. Pieter A. Riupassa, S.Si, MSi Ketua
2. Ir. J. Parera, MSi. Anggota
3. Dr. Ir. Edizon Jambormias, MSi
4. Dr. Ir. Dionisius Bawole, M.Si
5. Rajab, S.Pt. MSi
6. Frederik W. Ayal. S.Pi, M.Si

Seksi Usaha Dana 1. Dr. Ir. Rein E. Senewe, MP Ketua
2. Dr. Izaak T Matitaputty, SE, MSi Anggota
3. Dr. Ir. Cindy R.M. Loppies, M.Si
4. Dr. Ir. Venda J Pical, M.Si
5. Dr. Jusmi D. Putuhena, S.Hut, M.Si.
6. Dr. Vita Lawalatta, SP, MSi
7. Aryanto Boreel, S.Hut, M.Si
8. Marchiavel Moniharapon, S.Pt. M.Si
9. Dr. Stephen F.W. Thenu, SP. MSi.

Seksi Perlengkapan, Akomodasi, Transportasi 1. Dr. Risyart A. Far Far, SP, MSi Ketua
2. Dr. Ir. Raja B.D Sormin, M.Si Anggota
3. Christian Pattipeilohy, SPi, MSi
4. Dr. Paulus M. Putileihalat, SP, M.Si.
5. Dr. Herman Siruru, S.Hut, MSc
6. Dr. Ir. Frederika S. Pello, M.Si

Seksi Konsumsi

- | | |
|------------------------------------------|---------|
| 1. Wunuhalono H.E.D. Dahoklory, SPi, MSi | Ketua |
| 2. Dr. Anneke Pesik, S.P. M.Si | Anggota |
| 3. Ir. G.H Augustyn, M.Si | |
| 4. Ir. R. Bremer, M.Si | |
| 5. Ir. Meity L. Hehanussa, MSi. | |
| 6. Dr. Ir. Betty Sahetapy, MP | |
| 7. Novianty C Tuhumury, S.Pi, M.Si | |

Ditetapkan di Ambon pada Tanggal 31 Januari 2022

Dewan Pengurus Daerah

HA IPB Maluku

Dr. Ir. G.S.J Tomatala, M.Si
K e t u a

Dr. Ir. W. Waileruny, M.Si
S e k r e t a r i s

Daftar Isi

	Halaman
Cover	i
Tim Prosiding	ii
Kata Pengantar	iii
Kepanitiaaan Seminar Nasional DPD HA IPB Maluku	iv
Daftar Isi	vii
GENDER DAN KETAHANAN PANGAN PADA MASYARAKAT PESISIR KOTA AMBON Venda Jolanda Pical, Dortje L. Y. Lopulalan	1
HEMATOLOGI IKAN NILA (<i>Oreochromis niloticus</i>) DARI WADUK OLIGOTROFIK DAN EUTROFIK Diana Arfiati, Rizky Kusma Pratiwi, Zakiyyah Nur Inayah	8
PENGARUH PKG SERASAH KAMPUS UNPATTI DAN LIMBAH PERTANIAN TERHADAP FISIKO-KIMIA TANAH DAN HASIL JAGUNG (<i>Zea mays</i>L.) DI ULTISOL Maimuna La Habi, Muhammad Riadh Uluputty, Aminudin Umasangaji	12
KAJIAN KARAKTERISTIK MORFOLOGI PISANG TONGKA LANGIT DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU Marlita H. Makaruku, Anna Y. Wattimena, Vilma L. Tanasale, Jeanne I. Nendissa	23
IDENTIFIKASI JENIS GULMA PADA AREAL PERTANAMAN KELAPA DI DESA HATIVE BESAR Vilma L. Tanasale, Nureny Goo, Marlita H. Makaruku, Anna Yuliana Wattimena	28
KARAKTER MORFOLOGI TIGA KLON UBI JALAR DI MALUKU Anna Y. Wattimena, Reny Tomaso, Marlita H. Makaruku, Vilma L. Tanasale, Martha Amba	36
MORFOMETRIK LAMUN <i>Cymodocea rotundata</i> DI PESISIR PANTAI TANJUNG TIRAM, POKA, TELUK AMBON DALAM Jessico Hendrick Sermatang	41
KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN KOTA AMBON: DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN PESISIR TELUK AMBON DAN KERENTANANNYA TERHADAP BAHAYA TERKAIT DENGAN KENAIKAN MUKA LAUT Wahyu Budi Setyawan, Wempi Barends, Ahmad Ainarwowan, Dominggus Polnaya	50
SISTEM KOMUNIKASI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU (KASUS PANGAN LOKAL ENBAL DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA) Risyard Alberth Far Far, Lydia Maria Ivakdalam, George S. J. Tomatala	63
PERAN MASYARAKAT DESA DALAM MELESTARIKAN HUTAN DI NEGERI SAUNULU KECAMATAN TEHORU KABUPATEN MALUKU TENGAH Nova S Tuwael, Jusmy D. Putuhena, B. B. Seipalla	75
PENANGKAPAN TUNA MADIDIHANG (<i>THUNNUS ALBACARES</i>) DENGAN PANCING ULUR OLEH NELAYAN KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH Stany R Siahainenia, Ruslan Tawari, Haruna, Jacobus Paillin, Rifan Dikromo	84

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI POLA KONSUMSI IKAN RUMAH TANGGA NELAYAN DI KABUPATEN BURU SELATAN	92
Rahma Amaliyah Borut, Yolanda M. T. N Apituley, Johanis Hiariey, Dionisius Bawole	
EKSPLOITASI CUMI-CUMI DI PERAIRAN SELATAN PULAU AMBON	99
Welem Waileruny, Ketswin Pattirousamal, Delly D. P. Matratty, Anthonius Sakliresi	
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MANGROVE BERKELANJUTAN DI DUSUN MASIKA JAYA	109
Debby V. Pattimahu, Fanny Soselissa, Terezia V. Pattimahu	
DETERMINAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LITERASI KEUANGAN PELAKU UMKM DI KOTA AMBON	114
Restia Christianty, Teddy Christianto Leasiwal	
MODAL SOSIAL DAN KEBERLANJUTAN PEMANFAATAN LAHAN HUTAN UNTUK PENGELOLAAN DUSUNG	119
Marthina Tjoa, George S. J. Tomatala, Iskar	
KUALITAS MANUSIA MENUJU SATU ABAD GEREJA PROTESTAN MALUKU	124
Johny Christian Ruhulestin	
KESADARAN LITERASI DIGITAL: PELUANG, TANTANGAN DAN KERENTANANNYA BAGI KOMUNITAS LAUT-PULAU (Suatu Pemikiran)	135
Pieter Agusthinus Riupassa, Anneke Pesik	

SISTEM KOMUNIKASI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU (KASUS PANGAN LOKAL ENBAL DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA)

Communication System in the Development Local Food Maluku Province (Case Study Enbal of Local Food in Southeast Maluku District)

Risyart Alberth Far Far^{1*}, Lydia Maria Ivakdalam², George S. J. Tomatala³

^{1 3} Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon

² Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Maluku Indonesia, Ambon

*E-mail: alberth.farfar2013@gmail.com | DOI: <https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2022.HAIPBMAL.63-74>

Abstrak. Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara mengolah jenis ubikayu pahit sebagai pangan rumahtangga yang dikenal dengan “enbal”. Enbal merupakan salah satu sumber daya pangan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif dalam upaya penganeekaragaman konsumsi pangan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis sistem komunikasi dalam pengembangan pangan lokal enbal di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Dalam pengembangan pangan lokal elemen komunikasi dalam pengembangan masyarakat harus saling bersinergi dalam membangun pangan lokal guna menuju kemandirian pangan. Tugas pemerintah dalam urusan pangan adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang salah satunya dilaksanakan dengan mengeluarkan kebijakan tentang ketahanan pangan. Pihak swasta dan masyarakat berpartisipasi dalam mendukung kebijakan tersebut

Kata kunci: enbal, komunikasi, pangan

Abstract. The people of Southeast Maluku Regency process bitter cassava as household food which is known as "enbal". Enbal is one of the local food resources that can be used as an alternative food ingredient in an effort to diversify food consumption. The purpose of this paper is to analyze the communication system in the development of local enbal food in Southeast Maluku Regency. The results of the study explain that food is an important and strategic commodity for the Indonesian people because it is a basic need that must be met by the government and society together. In developing local food, communication elements in community development must synergize with each other in building local food in order to lead to food self-sufficiency. The government's task in food affairs is to organize, regulate, develop, control and supervise the availability of food, one of which is carried out by issuing policies on food security. The private sector and the community participate in supporting the policy

Keywords: enbal, communication, food

1. PENDAHULUAN

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan adalah masalah pangan. Pangan menjadi bahasan pokok untuk menyelesaikan kemiskinan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Pangan merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh manusia demi kelangsungan hidupnya. Masalah pangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di berbagai dunia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No 18 Tahun 2012).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan adalah dengan melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan. Penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas SDM dan pelestarian SDA. Mengingat penganeekaragaman

konsumsi pangan belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Bahwa upaya penganekaragaman konsumsi pangan harus berbasis sumber pangan setempat atau khas daerah. Hal ini agar diartikan bahwa pengurangan konsumsi beras tidak dapat digantikan dengan konsumsi gandum/ terigu yang hampir seluruhnya diimpor. Sementara konsumsi umbi-umbian bukan hanya sebagai pangan pilihan pengganti padi-padian namun juga sebagai pangan berpati (*starchy foods*) yang banyak mengandung serat dan dibutuhkan tubuh untuk dikonsumsi setiap hari, seperti sagu, ubi kayu, ubi jalar, talas, pisang, labu kuning, dan sukun.

Kebijakan pengembangan pangan lokal bertujuan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan sumberdaya lokal melalui usaha mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2009 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pangan impor.

Pengembangan pemanfaatan sumberdaya lokal ditujukan untuk peningkatan ketersediaan, mutu dan penganekaragaman pangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tergalinya potensi pangan lokal dalam meningkatkan ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang bermutu, beragam dan terjangkau di tingkat rumah tangga. Upaya penganekaragaman konsumsi pangan sebenarnya bukan merupakan perkara baru yang di hadapi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Namun, upaya tersebut belum menuai hasil optimal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di di Maluku. Saat ini sekitar 59% total konsumsi karbohidrat tiap penduduk/tahun di Maluku dipenuhi dari beras dan terigu, sisanya sebanyak 41% dipenuhi dari pangan lokal berupa sagu dan ubi-ubian. Dengan demikian, Maluku membutuhkan beras sekitar 120 ribu ton/tahun, sedangkan produksi beras di Maluku sekitar 70 ribu ton, dan sekitar 50 ribu ton harus didatangkan dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur (BPS Maluku 2018). Berdasarkan hal tersebut percepatan diversifikasi pangan menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan di Provinsi Maluku. Syah (2009) menjelaskan bahwa diversifikasi pangan adalah usaha yang terkait dengan penyediaan berbagai ragam produk pangan, baik dalam jenis maupun bentuknya sehingga konsumen memiliki berbagai pilihan menu makanan harian.

Maluku sebagai Provinsi Kepulauan memiliki banyak potensi sumber pangan lokal ubi-ubian. Beberapa kabupaten di Provinsi Maluku seperti Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki produk unggulan berbasis ubi-ubian (sumber pangan penghasil karbohidrat) yang jika dikembangkan secara optimal akan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan bagi masyarakat maupun memperkuat sistem ketahanan pangan daerah. Pemanfaatan ubi kayu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai bahan baku tapioka (tepung tapioka atau gaplek) dan sebagai pangan langsung. Ubi kayu sebagai pangan langsung harus memenuhi syarat utama, yaitu tidak mengandung racun HCN (< 50 mg per kg umbi basah). Sementara itu, umbi ubi kayu untuk bahan baku industri tidak disyaratkan adanya kandungan protein maupun ambang batas HCN, tapi diutamakan kandungan karbohidrat yang tinggi. Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara mengolah jenis ubikayu pahit sebagai pangan rumah tangga yang dikenal dengan "*enbal*". Enbal merupakan salah satu sumber daya pangan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan (Far-Far *et al.* 2020)

Enbal dikenal sebagai produk unggulan khas Kabupaten Maluku Tenggara. Pengembangan sistem informasi pangan enbal memiliki sasaran untuk meningkatkan kelancaran arus informasi pangan enbal dari sentra produksi ke pasar domestik/internasional. Pangan lokal enbal dapat dipasarkan dalam bentuk segar (*fresh-market commodities*) maupun ke industri pangan untuk jenis pangan yang perlu diolah; sebaliknya juga arus permintaan (*demand*) dari pasar domestik/internasional ke sentra produksi dan industri pangan enbal. Pengolah/petani enbal sebagai penghasil pangan lokal dalam mengembangkan usahanya harus mampu mencari dan memperoleh berbagai sumber informasi yang tersedia. Informasi merupakan faktor yang penting dalam pengkayaan pengetahuan pengolah/petani dalam pengembangan usahanya. Sistem

komunikasi pengembangan pangan lokal perlu diberdayakan sehingga informasi pertanian dari produksi sampai kepada pemasaran di optimalkan sehingga petani dapat memecahkan permasalahannya sehingga mutu dan hasil produksi pertanian pangan lokal dapat meningkat.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam mensukseskan program keanekaragaman pangan adalah melaksanakan *product development* yang memiliki sifat sangat praktis, tersedia dalam segala ukuran, kalau digunakan tidak ada sisanya dan mudah diperoleh. Bentuk makanan yang siap olah dan siap santap merupakan pilihan yang terbaik (Khomsan 1998). Pangan lokal enbal memiliki kriteria dan sifat tersebut. Tetapi permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya daya saing enbal yang disebabkan oleh rendahnya kualitas produksi (bentuk belum menarik), rendahnya kontinuitas produksi (tergantung pada musim tanam), dan harga tidak kompetitif (permintaan terbatas dan penawaran banyak). Padahal umbi-umbian seperti ubi kayu mempunyai prospek yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai substitusi beras dan untuk diolah menjadi makanan bergengsi. Kegiatan ini memerlukan dukungan pengembangan teknologi proses dan pengolahan serta strategi pemasaran yang baik dan juga kebijakan pemerintah daerah untuk mengubah *image* pangan inferior menjadi pangan normal bahkan superior.

Pengembangan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam hal ini pangan lokal enbal di Maluku Tenggara ditujukan untuk peningkatan ketersediaan, mutu dan penganekaragaman pangan. Upaya mewujudkan penyediaan pangan lokal dilakukan dengan bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal setempat. Sistem komunikasi dapat menjembatani ketiga hal tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan mengangkat permasalahan tentang sistem komunikasi pengembangan pangan lokal enbal di Kabupaten Maluku Tenggara. Sagu dan enbal merupakan makanan tradisional atau pangan lokal dari provinsi Maluku. Konsep ini merupakan hasil pemikiran yang dilandasi realitas di lapangan bahwa enbal merupakan salah satu pangan lokal yang masih tinggi konsumsinya di Kabupaten Maluku Tenggara dibandingkan dengan sagu di Kabupaten Maluku Tengah. Tingginya tingkat konsumsi tidak diikuti oleh daya saing enbal. Untuk itu makalah ini mengkaji bagaimana elemen-elemen sistem komunikasi dalam pengembangan pangan lokal enbal di Kabupaten Maluku Tenggara.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis sistem komunikasi dalam pengembangan pangan lokal enbal di Kabupaten Maluku Tenggara. Secara spesifik tujuannya adalah untuk mengetahui elemen-elemen sistem komunikasi dalam pengembangan pangan lokal enbal di Kabupaten Maluku Tenggara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui konten analisis isi dokumen-dokumen kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang berhubungan dengan upaya pengembangan pangan lokal enbal di Provinsi Maluku. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis* (analisis isi) pada dokumen-dokumen kebijakan nasional dan daerah Provinsi Maluku yang terkait dengan pengembangan pangan lokal di enbal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengembangan Pangan Lokal

Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumberdaya wilayah dan budaya setempat. Pangan lokal juga diartikan pangan yang asal usulnya secara biologis ditemukan di suatu daerah. Pangan adalah hak asasi setiap individu untuk memperolehnya dengan jumlah yang cukup dan aman serta terjangkau. Oleh karena itu, upaya pemantapan ketahanan pangan harus terus dikembangkan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Dalam menunjang keberhasilan ketahanan pangan penduduk Indonesia harus kembali ke makanan pokok lokal daerahnya masing-masing, sebagai contoh; orang Maluku dengan makanan pokok sagu, maka penduduk Maluku wajib mengkonsumsi sagu, tetapi pada saat ini mana ada orang yang suka makan sagu terus-menerus, tentunya akan merasa bosan dan merasa gengsi, maka sagu harus diolah dengan baik dan lebih bervariasi, begitu pula makanan pokok lainnya.

Maluku sebagai Provinsi Kepulauan memiliki banyak potensi sumber pangan lokal. Selain sagu ada juga ubi-ubian dan jagung. Beberapa kabupaten di Maluku seperti Kabupaten Maluku tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki produk unggulan berbasis ubi-ubian (sumber pangan penghasil karbohidrat) yang jika dikembangkan secara optimal akan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan bagi masyarakat maupun memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.

Dampak penguatan ketahanan pangan berbasis lokal, sangat baik, karena dapat meningkatkan potensi lokal sebagai bahan konsumsi pangan. Konsumsi pangan individu di tingkat rumah tangga umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; ketersediaan pangan, jenis, serta jumlah pangan dalam rumah tangga yang biasanya berkembang dari pangan pokok daerah setempat atau dari pangan yang telah ditanam. Selain itu, faktor sosial budaya wilayah setempat juga ikut mempengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat, termasuk jenis pangan yang harus diproduksi, cara pengolahan, penyaluran, penyiapan, serta penyajian pangan. Sementara itu, pilihan atau preferensi pangan umumnya ditentukan oleh adanya faktor penerimaan atau penolakan terhadap pangan oleh individu atau populasi (Hardinsyah 2007).

Apriani dan Baliwati (2011) menjelaskan bahwa beberapa jenis pangan sumber zat gizi yang mudah dijangkau, khususnya di daerah perdesaan antara lain sayuran hijau, kacang-kacangan, bij-bijian, telur, dan buah lokal. Jenis makanan-makanan tersebut dapat diperoleh dengan mudah di masyarakat dan dengan pengeluaran pangan minimal. Faktor ketersediaan pangan serta ekonomi tersebut dapat membentuk pola konsumsi pangan masyarakat yang tergolong baik serta dapat memenuhi kebutuhan akan zat gizi.

Pemanfaatan pangan lokal dapat membantu masyarakat lokal dalam memenuhi pangan secara berkesinambungan terutama untuk kebutuhan pangan rumah tangga. Sumber-sumber pangan lokal (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, dan sumber karbohidrat lainnya) sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pangan pokok pendamping beras. Program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan melalui Badan Ketahanan Pangan bertujuan:

- a. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan.
- b. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau serta akses pangan masyarakat.
- c. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan dan mencegah kerawanan pangan.

Pengembangan pemanfaatan sumberdaya lokal ditujukan untuk peningkatan ketersediaan, mutu dan penganekaragaman pangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tergalinya potensi pangan lokal dalam meningkatkan ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang bermutu, beragam dan terjangkau di tingkat rumah tangga. Peningkatan teknologi dan industri pengolahan pangan skala rumah tangga dan kecil diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah bahan pangan lokal melalui pemanfaatan, penguasaan dan penerapan teknologi budidaya, pengolahan pangan serta mendorong kelembagaan pelayanan dan lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan industri pengolahan bahan pangan berskala rumah tangga yang kokoh dan mandiri (dari hulu hingga hilir).

Pemanfaatan sumber pangan lokal di Provinsi Maluku masih dilakukan secara tradisional, baik dari aspek budi daya maupun pengelolaan pascapanen. Dengan demikian diperlukan percepatan adopsi teknologi pemanfaatan sumber pangan lokal yang diharapkan dapat menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan di daerah. Ketersediaan komoditas pangan lokal di Provinsi Maluku bukan merupakan faktor satu-satunya penentu konsumsi pangan penduduk Provinsi Maluku namun ada banyak faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi konsumsi pangan untuk menilai ketahanan pangan suatu wilayah. Ariani *et.al* (2013), menyatakan bahwa konsumsi pangan penduduk juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, gaya hidup, pengetahuan, aksesibilitas, dan sebagainya. Tidak hanya itu, peraturan dan kebijakan pemerintah ternyata juga ikut serta sebagai penentu peningkatan ketahanan pangan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan kesuksesan peningkatan ketahanan pangan nasional berawal dari sistem ketahanan pangan lokal yang baik.

Bagi Indonesia diversifikasi produksi dan konsumsi pangan lokal sangat mendesak. Diversifikasi produksi pangan adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi resiko produksi akibat perubahan iklim dan kondusif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal. Pada sisi konsumsi, diversifikasi memperluas spectrum pilihan dan kondusif untuk mendukung

terwujudnya pola pangan harapan. Pengembangan pangan lokal akan mendukung stabilitas ketahanan pangan nasional.

3.2 Enbal

Enbal (dalam bahasa daerah Kei) merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Daerah Kei Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. *Enbal* terbuat dari bahan ubi kayu yang telah diparut dan diperas untuk mengeluarkan air dari patinya yang kemudian disebut *enbal gepe*, lalu diayak untuk mendapatkan tepung *enbal*. “Enbal” merupakan salah satu jenis makanan tradisional masyarakat Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual) yang terbuat dari singkong/ubi kayu (*Manihot esculenta* Crantz) pahit dan menjadi makanan yang telah dikenal sejak lama secara turun temurun, diolah dengan cara dan peralatan yang sederhana serta jarang atau tidak ditemui di luar daerah Kepulauan Kei.

Enbal pada awalnya diproduksi di kepulauan kei hanya untuk dijadikan makanan sewaktu paceklik namun saat ini permintaan pasar terhadap enbal dan produk olahannya cukup tinggi bahkan telah berkembang menjadi enbal dengan beraneka ragam rasa dan aroma yaitu coklat, keju, dan kacang serta produk buah tangan (*oleh oleh*) favorit bagi tamu luar daerah maupun masyarakat lokal yang hendak bepergian keluar wilayah kepulauan kei. Enbal merupakan salah satu bahan pangan sumber energi karena mengandung karbohidrat tinggi, namun nilai gizi lainnya sangat rendah sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kandungan gizi enbal.

Enbal memiliki fungsi sosial dan budaya di kalangan masyarakat. Enbal memiliki beberapa kelebihan antara lain: 1) sangat mudah untuk perolehan hasil; 2) dapat dikonsumsi oleh semua orang setelah diolah; 3) memiliki daya simpan lama; 4) dapat diolah menjadi aneka makanan siap saji (menu makan malam, makan siang, menu sarapan pagi, dan menu selingan/snack/cemilan); 5) warna hasil olahan putih bersih tanpa pengawet; 6) cocok dijadikan sebagai rasi. Antisipasi kerawanan pangan di masa mendatang, *enbal* dijadikan alternatif pilihan, yaitu dijadikan sebagai pengganti beras/nasi. Sebagai salah satu makanan local, enbal memiliki peluang yang sangat baik untuk dikembangkan karena sudah di kenal dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara (Far-Far *et al.*2020).

Bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, *enbal* memiliki arti penting dan strategis. Enbal dijadikan makanan pokok sekaligus sebagai media keakraban dan persaudaraan. Suasana seperti itu semakin terasa pada saat datang dari rantau, niaga maupun setelah menyelesaikan pendidikan. *Enbal* dijadikan makanan utama mengalahkan jenis makanan pokok lainnya (beras dan jagung) atau sebagai bekal perjalanan dan buah tangan untuk sesama masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Proses pengolahan *enbal* secara tradisional disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir pembuatan tepung enbal cara tradisional (Riry et al, 2013).

3.3 Elemen-Elemen Sistem Komunikasi dalam Pengembangan Pangan lokal Enbal di Kabupaten Maluku Tenggara

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka elemen-elemen sistem komunikasi dalam pengembangan pangan lokal adalah menjadi tiga elemen, yaitu pemerintah, swasta dan

masyarakat. Untuk lebih memahami mengenai definisi dan peran masing-masing elemen, pada bagian ini dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/ kota, karena ketahanan pangan berkaitan dengan pelayanan dasar. Tugas pemerintah dalam urusan pangan adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang salah satunya dilaksanakan dengan mengeluarkan kebijakan tentang ketahanan pangan. Salah satu cara untuk mencapai ketahanan pangan adalah dengan penganekaragaman pangan yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang menjadi indikator tidak langsung keberhasilan ketahanan pangan.

Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari ketahanan pangan domestik/ lokal. Ketahanan pangan (*food security*) merupakan kondisi tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk kebutuhan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat serta terdistribusi merata di semua wilayah dan strata masyarakat. Dengan mengacu pada hal tersebut maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sesuai dengan peraturan presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kebijakan pengembangan konsumsi pangan dapat diarahkan pada:

- a. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang diarahkan untuk memperbaiki konsumsi pangan penduduk baik jumlah maupun mutu, termasuk keragaman dan keseimbangan gizinya;
- b. Pengembangan konsumsi pangan lokal baik nabati dan hewani yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pangan lokal dan makanan tradisional dengan memperhatikan standar mutu dan keamanan pangan sehingga dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan dan program pada dasarnya terdiri dari rencana kongkrit, guna mempercepat laju pengembangan daerah ini. Terkhususnya pada bidang ketahanan pangan yang mewujudkan ketahanan rumah tangga yang mandiri, berbasis pada kepulauan dan sumber daya lokal secara efektif dan berkelanjutan. Strategi pengembangan konsumsi pangan diarahkan pada tiga hal yaitu produk/ketersediaan, pengolahan dan pemasaran. Strategi pengembangannya adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah berupa peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan konsumsi pangan yang meliputi peningkatan pengetahuan/ kesadaran dan peningkatan pendapatan untuk mendukung kemampuan akses pangan oleh setiap rumah tangga.
- b. Peningkatan kemitraan. Merupakan implementasi, sinkronisasi dan kerjasama antara semua *stakeholders* dalam pengembangan konsumsi pangan termasuk pengembangan produksi/ pengembangan teknologi pengolahan pangan.
- c. Sosialisasi. Memasyarakatkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat dalam pengembangan konsumsi pangan melalui promosi, kampanye, penyebaran informasi melalui media massa (cetak dan elektronik) dan pemberian penghargaan.

Dalam era otonomi daerah peranan daerah otonom sangat penting untuk meningkatkan stok pangan lokal. Sistem ketahanan pangan sudah didesentralisasikan ke seluruh daerah otonom yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peranan pusat hanya membuat kebijakan-kebijakan strategis dan bersifat normatif, sedangkan implikasi teknis di lapangan diserahkan ke pemerintah daerah otonom. Nainggolan (2008) menyatakan bahwa, otonomi daerah memberikan keleluasaan dalam menetapkan prioritas pembangunan masing-masing daerah, diantaranya melalui pembangunan ketahanan pangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholders* pemerintahan daerah.
- b. Melaksanakan program pembangunan yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan antara daerah dengan pusat.
- d. Mempertahankan lahan produktif dan suplai air untuk pertanian.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kembali diversifikasi pangan menuju produksi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta yang terpenting adalah berbasiskan sumberdaya lokal. Diversifikasi pangan akan

mempunyai nilai manfaat yang besar apabila mampu menggali, mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal yang ada dengan tetap menjunjung tinggi hak atas pangan sebagai hak dasar manusia dan kearifan lokal. Sehingga harus segera dirumuskan langkah-langkah nyata tentang bagaimana memaksimalkan sumber pangan lokal ketimbang harus membeli beras diluar daerah, selain menghabiskan devisa, ini membahayakan perekonomian daerah karena tidak ada kemandirian pangan. Langkah-langkah strategis pembangunan ketahanan pangan kemudian ditindaklanjuti oleh langkah-langkah operasional yaitu dengan melaksanakan program pulau mandiri pangan, dalam konsep ini pengembangan dilakukan pada setiap pulau-pulau kecil sehingga diharapkan masyarakat di setiap pulau kecil mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Upaya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan keragaman pangan yang bersumber dari dalam negeri belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Padahal, Indonesia mempunyai potensi menghasilkan bahan pangan yang berasal dari umbi-umbian dan kacang-kacangan yang sangat besar. Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan telah dilakukan oleh pemerintah pusat dari zaman orde baru hingga saat ini. Kebijakan dan peraturan pemerintah dari zaman orde baru hingga sekarang ini dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Tahun	Kebijakan
1960	Program Perbaikan Menu Makanan Rakyat
1969	Pemerintah mempopulerkan slogan “Pangan Bukan Hanya Beras” dengan tujuan untuk memanfaatkan bahan pangan lokal, maka diperkenalkan Beras Tekad dari singkong untuk mengganti beras
1974	Pencanangan kebijakan diversifikasi pangan (INPRES Nomor 14 Tahun 1974) tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat disempurnakan dengan Inpres Nomor 20 Tahun 1979 tentang Menganekaragamkan Jenis pangan dan Meningkatkan Mutu Gizi Makanan Rakyat.
1989	Dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dengan Program “Aku Cinta Makanan Indonesia”.
1993 – 1998	Program Diversifikasi Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh Departemen Pertanian.
1996	Undang – Undang No. 7 tentang Pangan
2002	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tentang Ketahanan Pangan
2009	Peraturan Presiden RI No.22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal.
2009	Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/10/2009, Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
2009	Undang – Undang No 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2010	Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2010	Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab dalam Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011 – 2015 Pemerintah Provinsi melalui Gubernur diinstruksikan untuk menyusun rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN-PG) pada Tahun 2011)
2010	Undang – Undang No.13 tentang Hortikultura
2012	Undang - Undang No.18 tentang Pangan

Kebijakan dan peraturan pemerintah Indonesia dalam membangun ketahanan pangan terus dilakukan. Ketahanan pangan merupakan satu faktor penting dan pilar pembangunan untuk sektor lainnya. Ketahanan pangan pada tingkat nasional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Dari pengertian tersebut, idealnya kemampuan dalam menyediakan pangan bersumber dari dalam negeri sendiri.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, maka Pemprov Maluku melaksanakan politik pangan lokal dengan membuat strategi pengembangan yaitu, percepatan diverifikasi pangan lokal. Pemikiran untuk meningkatkan penganekaragaman pangan lokal membuat Pemerintah Provinsi Maluku untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan Maluku dan kemudian dijadikan Perda No 04 tahun 2010 Organisasi dan Tata

Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku (BKP) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi ketahanan pangan. “Badan Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan pangan Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. BKP awalnya berada di bawah pengawasan langsung Dinas Pertanian Maluku, yang dulunya hanyalah bidang ketahanan pangan. Namun oleh karena ketahanan pangan menjadi isu sentral maka bidang ketahanan pangan diberikan kemandirian guna melaksanakan tugas dalam pemenuhan pangan di Provinsi Maluku.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku mengemban misi dalam tahun 2016 - 2020, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
- b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
- c. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Adapun tujuan BKP Provinsi Maluku adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
- b. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan di Maluku;
- c. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat Maluku;
- d. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
- e. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

Swasta

Di level dunia, belum lama ini, FAO telah memberi swasta berbagai peluang untuk terlibat dalam pertanian pangan. Satu peristiwa penting di akhir tahun 2009 lalu mungkin akan menentukan perubahan peta kebijakan dan struktur pelaku ekonomi pangan di masa depan. Suatu pertemuan penting telah berlangsung di Milan pada 12-13 November 2009 dimana pihak swasta memberikan pernyataan dalam acara World Summit on Food Security. Forum swasta ini (Private Sector Forum) dihadiri perusahaan-perusahaan besar, dengan memberi kesempatan kepadanya untuk berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi, resiko, dan peluang-peluang untuk mengatasi krisis pangan di masa depan (FAO 2009).

Kebijakan pangan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh berbagai lembaga internasional yang intinya agar Indonesia menempuh privatisasi lembaga pangan, melepas cadangan beras nasional ke swasta, dan liberalisasi impor, mendorong agar swasta diperankan sebagai stabilisator harga dalam negeri. Mereka yakin sekali, pasar dapat menyelesaikan instabilitas harga, maupun kemiskinan (Rachmat 2010). Dalam berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, swasta sebenarnya cukup diberi peran. Pada bagian definisi dalam berbagai kebijakan perundang-undangan biasanya disebut “setiap orang” dengan makna adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan kata lain, swasta merupakan salah satu institusi yang diakui keberadaannya sebagai pelaku.

Meskipun tidak disebut secara tegas, namun dalam UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan nyata sekali bahwa banyak pasal-pasal dalam aturan tersebut dibuat untuk mengendalikan dan mengontrol pelaku swasta. Pada Pasal 41 misalnya disebutkan: “Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut”. Pada bagian lain UU tersebut terbaca banyak point yang mengatur keamanan pangan, berupa tindakan preventif terhadap pelaku yang disebut dengan masyarakat, tentu di dalamnya juga tercakup swasta.

Keberadaan swasta secara tidak langsung juga disebut dalam PNPM Mandiri 2007/2008. Pada bagian Strategi Dasar disebutkan untuk “Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat”. Selanjutnya, hal ini diperkuat lagi pada bagian Strategi Operasional dimana “Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki

masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis". Keberadaan swasta sangat jelas dalam kutipan ini. Tambahan pula, dalam UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diakui pula keberadaan penyuluh swasta selain penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya dari kalangan petani.

Swasta sebagai sebuah institusi ekonomi tidak dapat dihilangkan begitu saja keberadaannya. Indonesia yang bukan merupakan negara sosialis juga tidak dapat menutup akses swasta. Fakta sehari-hari juga demikian, dimana swasta telah lama memainkan peran langsung dalam ekonomi pertanian dan pangan. Swasta adalah elemen dalam sistem komunikasi yang berpengaruh dalam penjualan pangan lokal. Karena titik sentral sistem pengembangan pangan lokal ada pada para pedagang besar, yang sering dikenal dengan pedagang pengumpul besar, pedagang pengumpul kabupaten atau pedagang antar wilayah yang biasanya juga memiliki usaha pangan lainnya. Sehingga tidak dapat di sangkal bahwa pihak swasta sangat berpengaruh dalam distribusi dan konsumsi pangan di masyarakat.

Masyarakat

Uphoff (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya. Keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi. Keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan, serta dalam evaluasi pada pelaksanaan program. Partisipasi tersebut dibagi ke dalam beberapa jenis tahapan, yaitu:

- a. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan suatu kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
- c. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
- d. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Sumardjo 2008). Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, seperti psikologis individu (*needs*, harapan, motif, *reward*), pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal serta peraturan dan pelayanan pemerintah. Menurut Sumardjo (2008), ada unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu pada diri seseorang (*Person inner determinations*) dan terdapat iklim atau lingkungan (*Environmental factors*) yang memungkinkan terjadinya perilaku utama. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, *needs*, *rewards* dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pangan lokal merupakan hal yang sangat penting karena masyarakat merupakan subjek dan objek dalam pembangunan. Masyarakat merupakan salah satu elemen dari sistem komunikasi pengembangan pangan lokal yang menerima dampak langsung dari pengembangan pangan lokal. Sebagai makhluk sosial, individu petani pangan lokal senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Interaksi dapat terjadi baik dengan pihak lain di luar sistem sosialnya maupun di dalam sistem sosialnya. Dua indikator yang dapat menunjukkan karakteristik individu yang

berkaitan dengan interaksi dengan lingkungan sosial adalah tingkat kekosmopolitan dan keterlibatannya dalam suatu kegiatan kelompok.

Tingkat kekosmopolitan adalah keterbukaan petani terhadap informasi melalui hubungan mereka dengan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan. Menurut Mosher (1987), keterbukaan seseorang berhubungan dengan penerimaan perubahan-perubahan seseorang untuk meningkatkan kualitas kegiatan usahatani mereka. Sedangkan Rogers (2003) menyatakan bahwa kekosmopolitan adalah derajat sejauhmana seseorang berorientasi di luar sistem sosialnya. Tingkat kekosmopolitan dicirikan diantaranya dengan aktivitasnya ke luar sistem sosial, misalnya pergi ke luar sistem sosial (ke luar desa), berinteraksi dengan pihak luar sistem sosial (tamu), atau kontak dengan lembaga penelitian, keterdedahan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.

Perilaku atau tingkah laku adalah kebiasaan bertindak yang menunjukkan sikap/tabi'at seseorang yang terdiri atas pola-pola tingkah laku yang digunakan oleh individu dalam melakukan kegiatannya. Lebih jauh dikatakan bahwa perilaku itu terjadi karena adanya penyebab tingkah laku (stimulus), motivasi tingkah laku, dan tujuan tingkah laku. Terdapat tiga komponen yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif merupakan aspek emosional. Komponen kognitif merupakan aspek intelektual, yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konatif adalah aspek volitional, yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak (Rakhmat 2002).

Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari keinginan dan minatnya yang berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya (Suharto 2010).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir dirinya sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum (Setiana 2005). Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang dan budaya tertentu. Oleh sebab itu dalam program pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu strategi.

Setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, paling tidak harus memuat unsur-unsur pokok berikut: *pertama*, strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang merupakan acuan dari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, kerangka makro pemberdayaan masyarakat yang memuat berbagai besaran sebagai sasaran yang harus dicapai. *Ketiga*, sumber anggaran pembangunan sebagai perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. *Keempat*, kerangka dan perangkat kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, program-program pemberdayaan masyarakat yang secara konsisten diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat. *Keenam*, indikator keberhasilan program-program yang memuat perangkat pencatatan sebagai dasar pemantauan evaluasi program dan penyempurnaan program, serta kebijaksanaan yang menjamin kelangsungan program (Sumodiningrat 1999).

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Suradisatra (2008) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Kemandirian terjadi karena adanya partisipasi dari masyarakat. Semua partisipasi merupakan hasil dari adanya komunikasi.

Komunikasi yang terjadi dalam pemberdayaan sosial, selain komunikasi secara personal maupun kelompok juga dapat menggunakan komunikasi bermedia. Media dapat memberikan informasi yang komprehensif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Media yang digunakan dapat berupa media yang sering digunakan oleh masyarakat. Media memuat *content* yang berisi pesan pemberdayaan, seperti pesan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pesan yang dapat mempersuasi masyarakat untuk melakukan perubahan kecil. Fungsi media adalah memperkuat mutual understanding yang dicapai antara partisipan komunikasi, dan menyebarkan berita pembangunan di satu wilayah pada wilayah lainnya. Komunikasi bermedia dibangun dengan semangat komunikasi dengan masyarakat (*communication with society*), bersifat timbal balik (*two way traffict communication*) dalam rangka berbagi informasi dan mencapai kesepahaman. *Communication for development (commmunication supporting development)* didasari oleh sebuah premis bahwa pemberdayaan sosial yang sukses, terlihat dari timbulnya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat (*beneficiaries*) dalam setiap tahap proses pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam komunikasi, dimulai dari proses penggalian permasalahan dan perencanaan, implementasi tindakan/ aksi, hingga evaluasi dan penentuan rencana- rencana perbaikan.

4. SIMPULAN

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Dalam pengembangan pangan lokal elemen komunikasi dalam pengembangan masyarakat harus saling bersinergi dalam membangun pangan lokal guna menuju kemandirian pangan. Tugas pemerintah dalam urusan pangan adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang salah satunya dilaksanakan dengan mengeluarkan kebijakan tentang ketahanan pangan. Sedangkan swasta dan masyarakat berpartisipasi dan mendukung kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Apriani S, Baliwati YF. (2011). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat di Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Gizi dan Pangan*. Vol 6(3): 200-207.
- Ariani, M., Hermanto, G.S. Hardono, Sugiarto, dan T.S. Wahyudi. (2013). Kajian Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal. Laporan Kegiatan Kajian Isu-Isu Aktual Kebijakan Pembangunan Pertanian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- [BPS Promal] Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, (2018). Maluku Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Ambon.
- Far Far A. R., Saleh Amiruddin, Hubeis Musa, Djoko Susanto. (2020). The Influence Factors of Participatory Communication in the Development of Entrepreneurship Behavior in Enbal Casava Processing. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*. Vol 21(2):75-87.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. (2009). Issues in the global tobacco economy: Selected case studies. Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome.
- Hardinsyah. (2007). Review Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan. *Jurnal Gizi Pangan*. Vol 2(2): 55-74.
- Khomsan, M. A. (1998). *Potensi Pengembangan Makanan Tradisional dalam Rangka Mendukung Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI)*. Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mosher AT. (1987). Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Yogyakarta (ID): CV. Yasaguna.
- Nainggolan, Kaman. (2008). "Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan dan Harga Komoditas Pangan". *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 6 (2): 114–139.
- Peraturan Presiden RI No. 22 tahun (2009) tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Republik Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Rakhmat, J. (2002). *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Jakarta (ID): Remaja Rosdakarya.
- Rachmat M. (2010). Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 8 (1): 67-83.
- Riry J, Lawalata VN, Tapotubun EJ, Far Far R. (2013). Mutu Organoleptik Produksi Enbal Fortifikasi Ditinjau dari Daya Terima Konsumen. *JPHPI*. 16(3):159-267.
- Rogers EM. (2003). *Diffusion of innovations*. Fifth Edition. New York (US): The Free Press.

- Setiana L. (2005). *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Suharto E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung (ID): Refika Aditama.
- Sumardjo. (2008). *Penyuluhan Pembangunan Pilar Pendukung Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat*. Dalam Ida Yustina I dan Adjat Sudrajat. *Pemberdayaan Manusia Pembangunan Yang Bermartabat*. Bogor (ID): Sydex Plus.
- Sumodiningrat G. (1999). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Kumpulan Esei Tentang Penanggulangan Kemiskinan)*. Jakarta (ID): Bina Rena Pariwisata.
- Suradisastra K. (2008). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. *Forum Peneliti Agro Ekonomi*. Vol 26(2) Hal: 82-91.
- Syah, M. (2009). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung (ID): Remaja Rosdakarya.
- [UU] Undang Undang Nomor 22 Tahun (1999) Tentang Pemerintah Daerah. 1999.
- [UU] Undang-Undang Nomor 32 Tahun (2004) Tentang Pemerintah Daerah. 2004.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) tentang Desa.
- Undang Undang No. 19 Tahun (2013) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun (2006) Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. *Perikanan dan Kehutanan, Jakarta*.
- Uphoff N. (2000). *Social capital; A multifaced prespectiv*. Parta Dagusta dan Ismail Serageldin [editor]. Washington DC; World Bank.